

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

1e37740c6f05c1bcb938b9f637999624a31c3d66ac50509cb8f4caf2639756bd

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN AGROFORESTRI DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) GEDONG WANI

(Community Participation in the Development of Agroforestry at Gedong Wani Forest Management Unit/FMU)

Irma Yeny, Murniati, & Sri Suharti

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
email: irmayeny.kemenhut@yahoo.com, murni3008@yahoo.com, suharti23@gmail.com

Diterima 1 Juli 2019, direvisi 27 Maret 2020, disetujui 28 Maret 2020

ABSTRACT

As an effort to resolve conflicts in the FMU Gedong Wani area, a forestry partnership was conducted with an agroforestry system. To find out the extent to which the partnership scheme is able to invite community participation, then this study was conducted. This study aims to 1) determine the characteristics of the research area, 2) learn the profile of partnership farmers, 3) identify the form and level of participation of farmers, 4) formulate management recommendations. Data collection was carried out through interviews based on questionnaires and direct observation. Respondents are members of forest farmer groups involved in the partnership scheme. Measurements of participation are done with cross tabulation, while Likert scale method is using to measure participation level. The data is analyzed descriptively which refers to Hurrirah (2008) and Arnstein (1969). The study shows that there are three tangible forms of participation in the development of agroforestry, namely participation in the form of ideas, labor contributions, as well as social participation in the form of inter-community support as a sign of kinship in managing partnership land. The level of participation of Agro Forest Park Forest Farmer Group (FFG) is at the 6th level, namely partnership. At this level farmers are able to negotiate and engage in activities with its partner (FMU). With this position, farmers have more space and power to involve in decision-making process. However, farmers do not have space in managerial decision-making and managerial work. This is not in line with the forestry development paradigm that places the community as subjects in forest management.

Keywords: Participation; agroforestry; Forest Management Units (FMU) Gedong Wani.

ABSTRAK

Dalam upaya resolusi konflik di wilayah KPH Gedong Wani maka dilakukan Kemitraan Kehutanan dengan sistem agroforestri. Untuk mengetahui sejauh mana skema kemitraan tersebut mampu mengundang partisipasi masyarakat, maka penelitian ini dilakukan. Penelitian bertujuan untuk: 1) mengetahui karakteristik wilayah kajian, 2) mengetahui profil petani kemitraan, 3) mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi petani, 4) menyusun rekomendasi pengelolaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan bantuan kuesioner dan pengamatan langsung. Responden merupakan anggota kelompok tani hutan yang terlibat dalam skema kemitraan. Pengukuran bentuk partisipasi dilakukan secara tabulasi, sedangkan tingkat partisipasi menggunakan skala Likert. Data dianalisis dengan cara deskriptif yang mengacu pada Hurrirah (2008) dan Arnstein (1969). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga wujud nyata partisipasi dalam pengembangan agroforestri, yaitu partisipasi dalam bentuk buah pemikiran, sumbangan tenaga, dan partisipasi sosial berupa dukungan antar masyarakat sebagai tanda kekeluargaan dalam mengelola lahan kemitraan. Tingkat partisipasi petani KTH Agro Forest Park berada pada level ke-6, yaitu kemitraan. Pada level ini petani berpeluang untuk bernegosiasi dan terlibat dalam kegiatan dengan pemangku wilayah (KPH). Petani belum memiliki ruang dalam pengambilan keputusan dan melakukan manajerial. Hal ini belum sejalan dengan paradigma pembangunan kehutanan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan hutan.

Kata kunci: Partisipasi; agroforestri; Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani.

I. PENDAHULUAN

Partisipasi secara harfiah merupakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam segala atau sebagian proses pembangunan, baik secara fisik maupun emosional bertanggungjawab dalam menjalankan suatu program. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig & May, 1995 *dalam* Hikmat, 2004). Salahuddin (2012) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan level tertinggi jika dilihat dari sisi pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan hutan sebagaimana halnya pembangunan di perkotaan dan di pedesaan dapat dikatakan sukses jika perencanaan pembangunan tersebut mampu mengundang partisipasi masyarakat setempat (Fadli, 2010). Salah satu cara agar suatu program pembangunan didukung oleh partisipasi yang tinggi adalah melalui perencanaan pembangunan hutan yang berorientasi pada kebutuhan atau penyelesaian permasalahan di tingkat tapak.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani merupakan salah satu unit pengelolaan hutan tingkat tapak dengan fungsi produksi. KPH Gedong Wani berada di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur. Luas wilayah kelola KPH Gedong Wani adalah 30.243 ha yang tersebar di empat Register Kawasan Hutan Produksi (KHP). Arealnya tersebar di enam kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan lima kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan total 39 desa dan sekitar 21.183 kepala keluarga (KK) atau 84.299 jiwa menetap di dalam kawasan KPH Gedong Wani (UPTD KPH Gedong Wani, 2016).

Hasil penafsiran peta citra landsat tahun 2010 menunjukkan penutupan lahan di areal lokasi wilayah KPH Gedong Wani didominasi oleh lahan kering 68,95%; pertanian campuran 12,79%; lahan terbuka 7,9 %; pemukiman 5%; perkebunan 3,63%, dan semak belukar 0,89%. Berdasarkan

tutupan lahan, KPH Gedong Wani tidak memiliki areal berhutan yang dapat berfungsi untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan (ekologi) sebagai salah satu penciri kawasan hutan (UPTD KPH Gedong Wani, 2016).

Berdasarkan hasil pemetaan konflik yang dilaksanakan oleh KPH Gedong Wani tahun 2015 didapatkan informasi bahwa areal kelola KPH Gedong Wani merupakan daerah konflik dengan kriteria kritis sampai dengan sangat kritis karena tingginya aktivitas masyarakat di dalam kawasan. Alviya, Salminah, Arifanti, Maryani, & Syahadat (2012) menyatakan bahwa tantangan utama dalam penyelesaian konflik pengelolaan hutan adalah menyelaraskan antara kebutuhan berbagai kalangan, khususnya masyarakat lokal, dengan kepentingan kelestarian hutan.

Salah satu upaya resolusi konflik dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kemanfaatan tiga fungsi pengelolaan hutan (ekonomi, ekologi dan sosial) maka KPH Gedong Wani mengembangkan skema kemitraan antara KPH dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Forest Park untuk mengelola hutan produksi seluas 17 ha. Jasuli (2014) menyebutkan bahwa kemitraan sebagai bentuk aliansi antara dua pihak atau lebih yang membentuk kelompok kerjasama berdasarkan kesepakatan dengan tujuan yang sama untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Skema Kemitraan Kehutanan digagas sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengelola tanah pada areal hutan yang telah dibebani hak atau pada wilayah KPH. Skema ini juga sebagai wahana penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dengan masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan di wilayah tersebut. Pelaksanaan skema Kemitraan Kehutanan berpedoman pada

Peraturan Menteri Kehutanan No P.39/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara KPH Gedong Wani dan KTH Agro Forest Park pada tanggal 30 Juni 2015, KTH Agro Forest Park akan melakukan pengelolaan hutan dengan konsep agrowisata yang meliputi budidaya tanaman, perikanan, lebah madu, dan tumpangsari di bawah tanaman *Gmelina arborea*. Konsep ini dikenal juga dengan sistem agroforestri. Agroforestri merupakan suatu pola pertanaman antara tanaman semusim dan tanaman tahunan yang diaplikasikan untuk mendapatkan tutupan lahan yang mendekati optimal bagi keberlanjutan kemanfaatan (Hairiah & Sumeru, 2013). Pola tanaman di KPH Gedong Wani merupakan sistem agroforestri sederhana, sedangkan sistem agroforestri kompleks dapat dilakukan dengan kombinasi tanaman semusim, tanaman tahunan, hewan ternak, lebah madu, dan ikan. Agroforestri berfungsi ganda, baik produktif maupun protektif (mempertahankan keanekaragaman hayati, ekosistem sehat, konservasi air dan tanah, serta sequestrasi karbon) sehingga sering dipakai sebagai salah satu contoh sistem pertanian yang berkelanjutan (Hairiah & Sumeru, 2013) dan dapat menjadi sistem penggunaan lahan masa depan (Nair & Garrity, 2012).

Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan areal kemitraan dengan pola agroforestri maka komitmen anggota kelompok tani dalam berpartisipasi aktif menjadi sangat penting. Tanjung, Sadono, & Wibowo (2017) menyebutkan bahwa esensi dari kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah partisipasi dan keikutsertaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan dapat berupa keterlibatan dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi kegiatan (Liani, Roslinda, & Muin, 2015). Partisipasi tersebut dapat

dilihat berdasarkan bentuk dan tingkatan. Bentuk partisipasi menggambarkan wujud kerjasama yang diberikan oleh partisipan dalam mencapai tujuan kerjasama. Tingkatan partisipasi menggambarkan tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat yang dapat menggambarkan ada-tidaknya kemauan masyarakat untuk secara mandiri mencapai tujuan kerjasama. Riyanto, Sumardjo, Gani, Ginting, & Sugihen (2011) menyebutkan partisipasi memberikan dampak positif pada keberlanjutan manfaat hutan. Wulandari *et al.* (2014) menyebutkan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan proyek PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali. Oleh karena itu mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan agroforestri sangat penting untuk mengevaluasi kinerja dalam upaya mengembalikan fungsi ekologi yang sudah semakin berkurang di wilayah KPH Gedong Wani. Hikmat (2004) menyebutkan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui karakteristik wilayah kajian, 2) mengetahui karakteristik sosial petani kemitraan, 3) mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi petani, 4) menyusun rekomendasi pengelolaan dalam mengembangkan agroforestri melalui skema kemitraan dengan pengelola hutan di tingkat tapak (KPH Gedong Wani) dalam rangka pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

A. Landasan Teori

Secara umum partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk dan tingkat partisipasi. Bentuk partisipasi yang diberikan dapat berwujud nyata (*tangible*) misalnya berupa

alat pertanian, harta benda, uang, tenaga, dan keterampilan; dapat pula dalam bentuk tidak nyata (*intangible*) berupa pemikiran, menggerakkan massa, pengambilan keputusan, dan lain-lain (Laksana, 2013). Huraerah (2008) mengelompokkan bentuk partisipasi ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran, diberikan oleh partisipan dalam diskusi/*anjang sono*;
2. Partisipasi tenaga, diberikan oleh partisipan dalam kegiatan fisik pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya;
3. Partisipasi harta benda, diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa ataupun pertolongan bagi orang lain berupa uang, makanan, peralatan kerja, dan sebagainya;
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, diberikan orang untuk mendorong aneka

ragam bentuk usaha dan industri;

5. Partisipasi sosial, diberikan orang sebagai tanda kekeluargaan/*keguyuban*.

Tingkat partisipasi menggambarkan tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat yang dapat menunjukkan ada-tidaknya kemauan mereka untuk secara mandiri mencapai tujuan kerjasama (Winata & Yuliana, 2012). Tingkat partisipasi masyarakat menurut Arnstein (1969) didasarkan pada kekuatan masyarakat dalam menentukan rencana/program. Secara umum terdapat delapan tangga partisipasi dan tiga derajat partisipasi (Tabel 1).

Berdasarkan Tabel 1, tangga partisipasi level 1-2 berada pada tingkat pembagian kekuasaan di mana tidak terjadi partisipasi. Tangga partisipasi level 3-5 berada pada tingkat pembagian kekuasaan di mana partisipasi terjadi hanya untuk formalitas. Tangga partisipasi level 6-8, tingkat

Tabel 1 Delapan tangga partisipasi masyarakat dari Arnstein (1969)

Table 1 Eight steps of community participation from Arnstein (1969)

No.	Tangga partisipasi (<i>Steps of community participation</i>)	Hakekat kesetaraan (<i>Essence of equity</i>)	Tingkat pembagian kekuasaan (<i>Power distribution level</i>)
8	Pengawasan masyarakat (<i>Citizen control</i>)	Sepenuhnya dikuasai masyarakat (<i>Fully controlled by the community</i>)	Tingkat kekuatan ada pada masyarakat (<i>Citizen power</i>)
7	Pendelegasian kekuasaan (<i>Delegated power</i>)	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program) (<i>The community is provided power (partial or integral)</i>)	
6	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Timbal-balik dinegosiasikan (<i>Reciprocal negotiation</i>)	
5	Peredaman (<i>Placation</i>)	Saran masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan (<i>Community's suggestions are accepted but not always adopted</i>)	Sekedar membenaran agar mengiyakan (<i>Tokenism</i>)
4	Konsultasi (<i>Consultation</i>)	Masyarakat didengar tapi tidak selalu dipakai sarannya (<i>Community's suggestions are heard but not always accomodated</i>)	
3	Menyampaikan informasi (<i>Information</i>)	Pemberitahuan searah/sosialisasi (<i>Sharing information/socialization</i>)	
2	Terapi (<i>Therapy</i>)	Sekedar agar masyarakat tidak marah/mengobati (<i>Preventing people's resentment</i>)	Tidak ada partisipasi (<i>Non participation</i>)
1	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	Permainan oleh pemerintah (<i>Government's manipulation</i>)	

Sumber (*Source*): Arnstein, 1969; Wicaksono, 2010.

pembagian kekuasaan berada pada kekuatan masyarakat di mana masyarakat diberi kewenangan sepenuhnya untuk menjalankan program.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan selama 2 bulan (Maret dan November 2018) di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung yang merupakan wilayah kerja KPH Gedong Wani, Lampung Selatan.

C. Teknik Pengumpulan data

1. Penentuan Responden

Penentuan responden dilakukan secara purposif yang dipilih berdasarkan pertimbangan responden mampu menyampaikan informasi yang dibutuhkan dan dapat ditemui saat pengumpulan data dilakukan. Responden merupakan anggota KTH Agro Forest Park yang secara aktif mengelola lahan kemitraan, berjumlah 20 orang (74% dari total anggota), seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan bantuan kuesioner. Pengamatan langsung dilakukan terhadap karakteristik biofisik wilayah penelitian dan aktivitas pengembangan agroforestri. Aktivitas pengembangan agroforestri yang diamati meliputi kegiatan penyusunan rencana kerja, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Pengamatan penyusunan rencana kerja dilakukan oleh kelompok tani berlangsung pada malam hari. Pengamatan kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan dilakukan pada pagi dan siang hari.

D. Analisis Data

Data hasil wawancara ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden,

seperti umur, pendidikan formal, pekerjaan utama, luas lahan hutan yang digarap, dan lama berusahatani. Bentuk partisipasi dianalisis menggunakan pendekatan Hurairah (2008). Pengukuran tingkat partisipasi menggunakan skala *Likert* berdasarkan derajat keterlibatan responden dalam kegiatan agroforestri. Pertanyaan terkait tingkat partisipasi sebanyak 9 pertanyaan. Pertanyaan dijawab dengan dua tingkatan yaitu: melakukan (nilai skala 2) dan tidak melakukan (nilai skala 1). Untuk mengukur skor dari sebuah kegiatan, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor} = \frac{\text{Nilai skala} \times \text{jumlah responden} \times \text{jumlah pertanyaan}}{\text{jumlah pertanyaan}}$$

Hasil skor dari semua variabel tersebut digunakan untuk mengukur derajat keterlibatan dalam berbagai aktivitas pengembangan agroforestri. Skor minimum dan maksimum diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor minimum} = \frac{\text{jumlah pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \times \text{nilai terendah}}{\text{jumlah pertanyaan}}$$

$$\text{Skor maksimum} = \frac{\text{jumlah pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \times \text{nilai tertinggi}}{\text{jumlah pertanyaan}}$$

Hasil skor maksimum dikurangi skor minimum dibagi 8 level partisipasi maka diperoleh interval 22,5 pada 8 tingkat partisipasi. Derajat keterlibatan anggota KTH Agro Forest Park dianalisis menggunakan pendekatan tingkat partisipasi menurut Arnstein (1969).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Biofisik dan Sistem Usaha Wanatani di Areal Kemitraan KTH Agro Forest Park di UPTD KPHP Gedong Wani, Lampung Selatan

Luas areal kemitraan KTH Agro Forest Park yaitu 17 ha. Secara administratif kawasan ini terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung. Berdasarkan wilayah kerjanya, KPH Gedong Wani masuk pada kawasan hutan produksi (KHP) Gedong



Gambar 1 Peta KTH Agro Forest Park dalam peta situasi KPH Gedong Wani Resort Kandis
 Figure 1 Map of Agro Forest Park farmer group on the situation map of Gedong Wani FMU Kandis Resort.

Tabel 2 Potensi tegakan pohon di areal KTH Agro Forest Park
 Table 2 Potential of tree stand at KTH Agro Forest Park area

No.	Jenis tegakan (Species)	Jumlah pohon/tiang (Number of trees)	Rata-rata volume kayu per pohon (Average wood volume per tree) (m ³)
1.	Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>)	2.550	0,58
2.	Jati (<i>Tectona grandis</i>)	34	1,37
3.	Sengon (<i>Falcataria molluccana</i>)	116	0,2
4.	Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>)	4	0,35
Jumlah (Total)			0,63

Sumber (Source): UPTD KPH Gedong Wani, 2015.

Wani Register 40 dan termasuk wilayah DAS Sekapung yang meliputi Sub DAS Sekapung Hulu, Sub DAS Kandis, dan Sub DAS Katibung (Gambar 1).

Secara umum areal kemitraan KTH Agro Forest Park memiliki tipe iklim A dengan curah hujan rata-rata 1.930 mm per tahun dengan suhu minimum 21,6°C dan maksimum 34,9°C. Wilayah ini didominasi (93,9%) oleh kelas keterenggan datar (0-8%), 4,8% landai (8-15%) dan 1,2% bergelombang (15-25%) (UPTD KPH Gedong Wani, 2016). Keseluruhan wilayah tersebut telah dibagi menjadi 30 petak yang

dikelola oleh 27 anggota KTH. Luas lahan garapan masing-masing bervariasi dari 0,25 ha sampai dengan 1 ha. Penentuan luas lahan garapan dilakukan oleh Ketua KTH Agro Forest Park dengan mempertimbangkan kemampuan anggota dalam menggarap lahan. Anggota yang berumur produktif dengan tanggungan keluarga yang lebih banyak mendapat luas lahan garapan lebih besar dibandingkan anggota yang sudah berumur lanjut dengan tanggungan keluarga sedikit. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdapat 3 anggota KTH yang masing-masing memiliki dua petak garapan.

Berdasarkan hasil inventarisasi tegakan yang dilakukan pada tahun 2016, di areal kemitraan KTH Agro Forest Park terdapat tegakan jenis gmelina (*Gmelina arborea*), jati (*Tectona grandis*), sengon (*Falcataria molluccana*), dan mahoni (*Swietenia macrophylla*) dengan jumlah pohon dan rata-rata volume disajikan pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa potensi volume kayu di areal kemitraan Agro Forest Park mencapai 0,63 m³/pohon. Selain potensi volume kayu, pada areal kemitraan juga terdapat potensi lain berupa wilayah cekungan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya atau tambak ikan air tawar. Di areal kemitraan Agro Forest Park juga dikembangkan beberapa jenis tanaman palawija seperti padi hitam, jagung, ubikayu, dan terong. Rerata produktivitas padi (hitam) adalah 2,39 ton/ha (gabah kering giling) dan jagung 1,5 ton/ha. Produktivitas tersebut masih rendah dibandingkan dengan produktivitas padi dan jagung di Kabupaten Lampung Selatan yang masing-masing mencapai 5 ton/ha (padi) dan 4-5 ton/ha (jagung). Hal tersebut terutama terkait dengan tingkat pengelolaan sistem usahatani yang masih rendah dengan teknologi seadanya.

B. Karakteristik Sosial Kelompok Tani KTH Agro Forest Park

KTH Agro Forest Park merupakan kelompok tani hutan yang berbadan hukum dengan akta notaris No. 53/BH/X.I/III.08/XII/2014. Anggota KTH Agro Forest Park dahulunya adalah petani perambah di kawasan hutan pada areal KPH Gedong Wani. Sebagai upaya resolusi konflik maka KPH melakukan pembinaan dengan sosialisasi skema kemitraan kehutanan di areal KPH Gedong Wani dan membentuk KTH.

Kelompok tani merupakan wadah bagi para petani untuk memajukan dan memudahkan pembinaan anggotanya. Hasil wawancara menunjukkan, terbentuknya kelompok ini didasarkan pada upaya resolusi konflik dan adanya kemauan petani untuk meningkatkan taraf hidup petani tumpangsari di kawasan hutan. Anggota KTH Agro Forest Park berjumlah 27 orang yang sebagian besar berdomisili di Desa Karang Rejo dan Desa Sidoarjo. Kondisi sosial ekonomi anggota KTH Agro Forest Park disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa anggota KTH Agro Forest Park seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dan umur produktif (41-

Tabel 3 Kondisi sosial anggota KTH Agro Forest Park, Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung
Table 3 Social condition of Agro Forest Park FFG member at Karang Rejo Village, Jati Agung Sub District

No.	Karakteristik responden (Characteristic of respondent)	Klasifikasi (Classification)	Jumlah responden (Number of respondents)	Persentase (Percentage) (%)
1	Jenis kelamin (<i>Gender</i>)	- Laki-laki (<i>Male</i>)	27	100
		- Perempuan (<i>Female</i>)	0	0
2*	Umur, tahun (<i>Age, year</i>)	20-30	1	3.70
		31-40	1	3.70
		41-50	13	48.15
		51-60	7	25.93
		>60	5	18.52
3*	Pendidikan formal (<i>Formal education</i>)	- Buta huruf (<i>Illiterate</i>)	1	3.70
		- SD (<i>Primary school</i>)	16	59.26
		- SMP (<i>Junior high school</i>)	7	25.93
		- SMA (<i>Senior high school</i>)	3	11.11

Tabel 3 Lanjutan
Table 3 Continued

No.	Karakteristik responden (Characteristic of respondent)	Klasifikasi (Classification)	Jumlah responden (Number of respondents)	Persentase (Percentage) (%)
4*	Pekerjaan utama (Main job)	- Petani/Buruh tani (Farmer/farm worker)	26	96.30
		- Pedagang dan jasa lainnya (Trader and other services)	1	3.70
5*	Luas lahan hutan yang digarap, ha (Area of forest land under cultivation, ha)	≤ 0,25	1	3.70
		0,26-0,50	6	22.22
		0,51-0,75	5	18.52
		0,76-1	5	18.52
		> 1	10	37.04
6	Pengalaman berusahatani, tahun (Farming experience, years)	1-5	3	15.00
		5-10	3	15.00
		11-15	3	15.00
		16-20	11	55.00
		21-30	0	0
		31-35	0	0

Keterangan (Remark): *Murniati, Yeni, Minarningsih, & Sumarhani (2018)

Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2018.

50 tahun). Homogenitas jenis kelamin anggota kelompok tani terjadi akibat mayoritas penduduk yang bekerja di ladang adalah laki-laki. Salampessy, Nugroho & Purnomo (2012) menyebutkan masyarakat yang memiliki homogenitas pada aspek budaya dan minat ekonomi akan memudahkan pewujudan dan peningkatan partisipasi masyarakat seperti halnya dalam pengelolaan kawasan Hutan Lindung Gunung Nona di Maluku. Walaupun secara administrasi keanggotaan KTH Agro Forest Park seluruhnya laki-laki, namun peran perempuan, baik istri maupun anak perempuan dalam operasional pelaksanaan kegiatan agroforestri juga cukup signifikan. Peran perempuan dalam pengembangan agroforestri di KPH Gedong Wani terlihat pada kegiatan penanaman tanaman bawah dan pemanenan. Persentase kehadiran perempuan dalam kegiatan agroforestri di areal lahan kemitraan mencapai 55%, lebih rendah dibandingkan dengan persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan

agroforestri di Desa Werembungan. Umagap, Ratag, & Walangitan (2016) menyebutkan persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan agroforestri di Desa Warembungan Kecamatan Pineleleng, Sulawesi Utara sebesar 80% dengan tingkat partisipasi tergolong kategori sedang. Pada kategori sedang perempuan kadang-kadang dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada penerapan agroforestri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

Anggota KTH Agro Forest Park yang sebagian besar berada pada usia produktif (41-50 tahun) diduga mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pengembangan agroforestri. Hal ini terlihat pula pada partisipasi masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan lindung Gunung Buduk Kabupaten Sanggau, di mana usia rata-rata responden 43 tahun lebih banyak berperan aktif dalam kegiatan pelestarian hutan dibandingkan usia tua (Damiati, Lumangkun, & Dirhamsyah, 2015).

Pendidikan sebagian besar anggota KTH (59,26%) relatif rendah (setingkat sekolah dasar/SD) dengan mata pencaharian utama sebagai petani. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah pada umumnya tidak memiliki pilihan mata pencaharian selain bertani. Fielke & Bardsley (2014) menyebutkan petani yang berpendidikan formal tinggi memiliki peran dalam membangun kapasitas adaptasi dan berkompetisi dalam bidang ekonomi sehingga mampu memiliki alternatif mata pencaharian lainnya. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar pasar tenaga kerja dan peluang mendapat gaji lebih menarik (Besamusca, Tijdens, Keune, & Steinmetz, 2015).

Selain mengolah lahan milik dan lahan garapan pada areal kemitraan, 80% anggota KTH Agro Forest Park juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh tani 60% dan 20% sebagai pekerja bangunan. Aktivitas sebagai petani dan buruh tani rata-rata telah dilakukan sejak 16-20 tahun yang lalu. Pekerjaan sebagai buruh tani biasanya dilakukan pada saat musim tanam jagung

atau padi atau sebagai buruh penyadap karet. Pekerjaan sampingan dilakukan untuk menambah pendapatan keluarga dan modal untuk kegiatan usahatani berupa pembelian bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya.

Total luas lahan garapan petani pada areal kemitraan bervariasi dari 0,25 ha-2 ha, sedangkan lahan pekarangan dan garapan di luar areal kemitraan sebesar <1 ha. Meskipun sudah didukung oleh tambahan pendapatan dari pekerjaan sampingan, namun luas lahan garapan yang relatif sempit belum dapat memberikan pendapatan yang mencukupi bagi petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Petani berpendapat bahwa luas lahan <2 ha belum mampu menjamin keberlanjutan kegiatan usahatani yang merupakan sumber pendapatan utama. Keberlanjutan usahatani yang dimaksud adalah, ketika petani memiliki lahan yang sempit maka petani akan menanam satu jenis tanaman yang memiliki nilai jual tinggi. Di sisi lain, pada saat panen seringkali produksi berlimpah dan harga jual menjadi rendah. Jika lahan garapan luas maka petani dapat melakukan diversifikasi tanaman dengan

Tabel 4 Partisipasi reponden dalam kegiatan pengembangan agroforestri pada lahan kemitraan Agro Forest Park
Table 4 Respondent participation in agroforestry development activities at Agro Forest Park

Uraian kegiatan (<i>Activities</i>)	Terlibat aktif (<i>Actively involve</i>) (%)	Terlibat pasif (<i>Passively involve</i>) (%)	Tidak terlibat (<i>Not involved</i>) (%)
Tahap perencanaan (<i>Planning stage</i>)			
– Penyusunan rencana teknis (<i>Technical plan preparation</i>)	85	5	10
Tahap pelaksanaan (<i>Implementation stage</i>)			
– Peyiapan ajir (<i>Stick preparation</i>)	90	0	10
– Pembersihan lahan (<i>Land preparation</i>)	85	0	15
– Penanaman pohon (<i>Tree planting</i>)	85	0	15
– Penanaman tanaman bawah (<i>Annual crop planting</i>)	95	0	5
– Penyiangan (<i>Weeding</i>)	95	0	5
– Penyulaman (<i>Tree seedling replacing</i>)	85	0	15
Tahap pemanfaatan (<i>Utilization stage</i>)			
– Pemanenan (<i>Harvesting</i>)	80	0	20
– Pemasaran hasil (<i>Product marketing</i>)	95	0	5
Rerata (<i>Average</i>)	88,3	0,6	11,1

Sumber (*Source*): Data Primer (*Primary data*) 2018

sistem panen yang bergilir. Sistem ini dianggap mampu mengatasi rendahnya harga jual salah satu produk dan dapat memenuhi kebutuhan modal usahatani (bibit dan pupuk). Luas lahan yang dianggap mampu menjamin keberlanjutan kegiatan usahatani adalah ≥ 2 ha.

C. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Petani

Partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pengembangan agroforestri di lahan kemitraan Agro Forest Park telah memenuhi kriteria partisipatif karena telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Sebagian besar responden menyatakan upaya pelibatan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tertinggi terlihat pada kegiatan pelibatan dalam proses pelaksanaan dan pemanfaatan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam beberapa tahap pengembangan agroforestri pada lahan kemitraan Agro Forest Park disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas responden (88,3%) telah terlibat aktif dalam kegiatan pengembangan agroforestri. Persentase petani yang berpartisipasi tertinggi (95%) terlihat pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan, sedangkan partisipasi untuk tahap perencanaan sebesar 85%. Berbeda dengan tingkat partisipasi kerja (TPK), petani dan keluarganya pada usaha hutan rakyat di Desa Tanjungkerta, Desa Karyabakti dan Desa Sepatnunggal masih tergolong rendah (Diniyati, 2018).

Dari lima bentuk partisipasi masyarakat yang dikemukakan Hurrirah (2008), terdapat tiga wujud nyata partisipasi dalam pengembangan agroforestri pada kemitraan Agro Forest Park, yaitu partisipasi dalam bentuk pemikiran, sumbangan tenaga, dan partisipasi sosial berupa dukungan antar masyarakat sebagai tanda kekeluargaan dalam mengelola lahan kemitraan.

Bentuk partisipasi berupa sumbangan pemikiran terlihat pada saat penyusunan rencana teknis. Dalam penyusunan rencana teknis, 85% responden aktif menyampaikan hal-hal teknis yang sebaiknya dilakukan dalam mengembangkan agroforestri. Beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan dalam mengembangkan agroforestri di lahan kemitraan adalah jenis tanaman kayu dan tanaman bawah yang akan dikembangkan. Petani menyarankan jenis tanaman kayu dan tanaman bawah yang dikembangkan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) mampu bertahan pada musim kering yang panjang, 2) mampu bertahan terhadap genangan air jika curah hujan berlebih, 3) merupakan sumber kayu dan pangan, 4) memiliki nilai jual yang relatif tinggi, dan 5) mudah dipasarkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka beberapa jenis tanaman yang menjadi pilihan adalah jati (*T. grandis*), petai (*Parkia speciosa*), dan jagung (*Zea mays*) (Murniati *et al.*, 2018). Berdasarkan kondisi tersebut maka bentuk partisipasi dalam penyusunan rencana teknis pengembangan agroforestri yang dilaksanakan tidak bersifat top down atau diskusi satu arah antara pengelola dan penggarap lahan. Penyusunan rencana teknis berlangsung secara partisipatif sebagai wadah bertukar pikiran dan penyampaian kebutuhan dan kendala masyarakat dalam pengembangan agroforestri. Hal ini selaras dengan yang terjadi dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Desa Banjaran, Kecamatan Driyero, Kabupaten Gresik. (Suroso, Hakim, & Noor, 2014) menyebutkan masyarakat memiliki partisipasi yang tinggi dalam menyampaikan aspirasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

Bentuk partisipasi tenaga sebagai anggota program pengembangan agroforestri di areal kemitraan terlihat pada kegiatan pelaksanaan dan pemanfaatan hutan untuk

pengembangan tanaman pangan dan energi. Dalam rancangan teknis yang disusun pada tahun 2015, kegiatan penanaman dengan pola agroforestri, yaitu tumpangsari antara tanaman buah berjarak tanam 9 m x 8 m, karet 5 m x 3 m, serta padi gogo/padi ladang. Pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan, 85-95% dari petani penggarap terlibat dalam setiap tahapan kegiatan. Sebesar 5-15% dari petani tidak terlibat langsung dalam memberikan partisipasi tenaga dan pada umumnya mereka mengupah tenaga buruh untuk kegiatan pembersihan lahan dan penanaman. Bentuk partisipasi sosial terlihat pada tahap pemanenan yang dilakukan bersama-sama anggota keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut maka ketiga bentuk partisipasi anggota KTH pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan telah terlihat dalam mengelola lahan kemitraan secara bersama dan bertanggungjawab. Menurut Irene (2011), bentuk partisipasi yang dilakukan secara bersama merupakan bentuk partisipasi horizontal di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi sejajar satu dengan yang lainnya. Bentuk partisipasi vertikal di mana hubungan masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut

atau klien tidak terlihat. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Partisipasi dalam bentuk finansial atau modal dan sumbangan keterampilan belum terlihat pada aktivitas pengembangan agroforestri di KPH Gedong Wani. Hal ini diduga disebabkan oleh karakteristik petani, keterbatasan petani penggarap dalam hal harta benda maupun rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan Ruhimat (2015) yang menyatakan bahwa tingkat motivasi petani dipengaruhi secara langsung oleh kapasitas petani dan karakteristik petani. Irawan (2011) mengatakan partisipasi petani dipengaruhi oleh umur, pendidikan, luas lahan rumah tangga, dan pengalaman petani dalam usaha hutan rakyat.

Upaya peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Menurut Obiri *et al.* (2011) kehadiran penyuluh yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Semakin lama, pendidikan formal yang dimiliki petani mampu mendorong terjadinya kegiatan berwawasan lingkungan (Chankrajang

Tabel 5 Skor partisipasi masyarakat dalam pengembangan agroforestri pada kemitraan Agro Forest Park menurut tangga partisipasi Arnstein

Table 5 Community participation score in agroforestry development of Agro Forest Park partnership according to Arnstein participation steps

	Tangga partisipasi (<i>Steps of community participation</i>)	Skor (<i>Score</i>)	Tingkat pembagian kekuasaan (<i>Power distribution level</i>)
8	Pengawasan masyarakat (<i>Citizen control</i>)	360	
7	Pendelegasian kekuasaan (<i>Delegated power</i>)	337,5	Tingkat kekuatan pada masyarakat (<i>Citizen power</i>)
6	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	315	
5	Peredaman (<i>Placation</i>)	292,5	
4	Konsultasi (<i>Consultation</i>)	270	Sekedar membenaran agar mengiyakan (<i>Tokenism</i>)
3	Menyampaikan informasi (<i>Information</i>)	247,5	
2	Terapi (<i>Therapy</i>)	225	
1	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	202,5	Tidak ada partisipasi (<i>Non participation</i>)
		180	

Sumber (*Source*): Data primer (*Primary data*), 2018

& Muttarak, 2017). Karakteristik petani terlihat pada kapasitas kelembagaan kelompok tani, di mana peran ketua kelompok masih sangat mendominasi peran anggota sehingga mengurangi kedinamisan anggota dalam berpartisipasi. Ruhimat (2017) menyebutkan kapasitas kelembagaan kelompok tani dipengaruhi secara langsung oleh tingkat kedinamisan dan partisipasi anggota, serta secara tidak langsung oleh peran pemimpin, kapasitas anggota, peran penyuluh, dan dukungan parapihak. Sumiati (2011) mengemukakan dukungan berbagai pihak sangat diperlukan dalam proses penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani seperti dukungan kebijakan, kemitraan, biaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga pendamping.

Pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari derajat wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan digolongkan menjadi tingkatan *non participation*, *tokenisme*, dan *citizen power* oleh Arnstein

(1969). Berdasarkan perhitungan interval pada masing-masing tingkat pembagian kekuasaan maka *non participation* memiliki skor 180-225, *tokenisme* memiliki skor 226-292,5, dan *citizen power* memiliki skor 293-360 (Tabel 5).

Tabel 5 menggambarkan delapan anak tangga sebagai bentuk penyerderhanaan poin gradasi partisipasi warga. Anak tangga bawah (1, manipulasi dan 2, terapi) menggambarkan tingkat "non-partisipasi". Pada tingkatan ini pemangku wilayah tidak mendorong orang untuk berpartisipasi dalam perencanaan atau melakukan program, tetapi pemangku wilayah "mendidik" atau "menyembuhkan" para petani penggarap. Pada kondisi ini biasanya petani penggarap memiliki keterbatasan dalam kemandirian.

Anak tangga 3, 4, dan 5 merupakan tingkat "tokenisme" di mana pemangku wilayah telah menyampaikan informasi, mengkonsultasikan, mendengarkan, dan menerima berbagai kritik dan saran yang

Tabel 6 Rekapitulasi skor tingkat partisipasi petani pada pengembangan agroforestri di areal kemitraan KTH Agro Forest Park

Table 6 Recapitulation of farmer participation level score in agroforestry development at Agro Forest Park FFG partnership

No.	Indikator (<i>Indicator</i>)	Skor (<i>Score</i>)
1.	Tahap Perencanaan (<i>Planning stage</i>)	
	– Hadir dalam kegiatan penyusunan rencana teknis (<i>Present at technical plan preparation activity</i>)	34
2.	Tahap pelaksanaan (<i>Implementation stage</i>)	
	– Terlibat dalam kegiatan penyiapan ajir (<i>Involved in stick preparation</i>)	36
	– Terlibat dalam kegiatan penyiapan lahan (<i>Involved in land preparation</i>)	34
	– Terlibat dalam penanaman pohon (<i>Involved in tree planting</i>)	34
	– Terlibat dalam penanaman tanaman bawah (<i>Involved in annual crop planting</i>)	38
	– Terlibat dalam penyiangan (<i>Involved in weeding</i>)	38
	– Terlibat dalam penyulaman (<i>Involved in tree seedling replacement</i>)	34
3.	Tahap pemanfaatan (<i>Utilization stage</i>)	
	– Terlibat dalam pemanenan (<i>Involved in harvesting</i>)	32
	– Terlibat dalam pemasaran hasil (<i>Involved in product marketing</i>)	38
Skor total (<i>Total scores</i>)		318
Kriteria (<i>Criteria</i>)		Kekuatan pada masyarakat (<i>Citizen power</i>)

Sumber (*Source*): Data primer (*Primary data*), 2018.

disampaikan masyarakat. Pada kenyataannya petani tidak memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa pandangan mereka akan diakomodir oleh pemangku wilayah. Ketika partisipasi dibatasi pada level-level ini, tidak ada jaminan untuk mengubah hak pemegang kekuasaan berpindah kepada petani.

Anak tangga 6, 7, 8 adalah tingkat kekuatan petani dengan peningkatan derajat pengambilan keputusan. Petani pada level (6) kemitraan memungkinkan mereka untuk bernegosiasi dan terlibat dalam kegiatan dengan pemangku wilayah. Di anak tangga (7) kekuatan warga telah didelegasikan dan masyarakat diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, dan tingkat (8) warga memiliki kekuatan penuh, berfungsi sebagai kontrol yang memperoleh peran dalam pengambilan keputusan, atau kekuatan manajerial serta mampu mengevaluasi kinerja pemangku wilayah (inisiator kegiatan). Tabel 6 menunjukkan tingkat partisipasi KTH Agro Forest Park dalam mengembangkan agroforestri di areal kemitraan.

Tabel 6 menunjukkan bahwa menurut tangga partisipasi Arnstein (1969), partisipasi petani KTH Agro Forest Park dalam mengembangkan agroforestri berada pada tingkatan ke-6 yaitu kemitraan. Pada tingkatan ini petani memiliki posisi sebagai mitra yang setara dalam mengembangkan areal KPH Gedong Wani. Kerjasama kemitraan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui upaya pengembangan kapasitas dan memberikan akses guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Selanjutnya petani secara bertahap diharapkan dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Pada saat ini kemitraan yang dibangun antara KPH Gedong Wani dengan KTH Agro Forest Park masih menempatkan partisipasi petani pada level 6. Pada level ini petani telah memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat dalam kegiatan bersama

pengelola kawasan, namun petani belum memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan manajerial. Peran pengelola (KPH) dalam mengembangkan areal kemitraan masih dominan dalam hal mengatur pola pengelolaan, pengadaan bibit tanaman kayu/MPTS serta memfasilitasi biaya penanaman. Hal serupa juga terjadi pada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang dikembangkan di BKPH Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat di mana penentuan desain tanaman, pengaturan kerjasama, dan pengaturan pola bagi hasil masih didominasi oleh Perhutani (Parhusip, Suharti, Sukandi, Amano, & Matsumura, 2019). Selain itu, hadirnya lembaga penelitian, baik dari perguruan tinggi maupun kementerian di areal kemitraan hanya mampu sebagai mitra kerja, sementara posisi petani tetap tidak sejajar dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini diduga karena adanya kebijakan internal di level pengelola untuk memfasilitasi kelompok petani yang bermitra dalam bentuk usaha kehutanan. Petani tersebut pada umumnya belum mandiri, baik secara modal maupun konsep pengelolaan. Kondisi ini terlihat dari belum adanya partisipasi dalam bentuk sumbangan finansial ataupun material serta partisipasi keterampilan yang diberikan responden dalam mengembangkan lahan garapannya. Hal yang sama terjadi pada program penanaman dan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh Himateka IPB dan Himapika UNPAD. Masyarakat seolah-olah diposisikan sebagai mitra kerja tetapi dalam faktanya posisi mereka tidak sejajar dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan (Gumilar, 2012). Hal ini berbeda dengan areal kemitraan di KPH Gedong Wani yang dikelola dengan usaha ternak ayam. Pada pola kemitraan ini pengelola tidak terlibat dalam perencanaan maupun fasilitasi modal sehingga proses pengambilan keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan mitra.

Tingkat partisipasi petani dalam mengembangkan agroforestri di areal kemitraan belum sepenuhnya sejalan dengan paradigma pembangunan kehutanan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan hutan. Hal ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat di areal kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Tingkat partisipasi yang dibangun dalam areal KPH sangat berbeda dengan yang dilakukan pada areal KHDTK. Walaupun pada areal KHDTK dapat dilakukan pola kemitraan antara masyarakat dengan pengelola kawasan namun tahap pendelegasian kekuasaan masih sangat rendah. Desmiwati (2016) menyebutkan partisipasi petani penggarap di Hutan Penelitian (HP) Parung Panjang berada pada tahap terapi atau perbaikan. Petani penggarap tidak berpartisipasi aktif dalam merencanakan maupun melaksanakan program pengelolaan HP Parung Panjang. Masyarakat hanya menjadi objek dalam program.

D. Rekomendasi Arah dan Strategi Pengelolaan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa anggota KTH Agro Forest Park cukup menyadari pentingnya pengembangan agroforestri di wilayah kemitraan, namun aplikasinya masih sebatas di lahan pekarangan. Di areal kemitraan, sebagian petani masih memanfaatkan lahan dengan pola tanam monokultur. Hal ini diduga akibat kerjasama yang dibatasi hanya 2 tahun menyebabkan petani tidak tertarik untuk menanam tanaman kayu secara mandiri. Terdapat pemikiran bahwa tanaman kayu membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dipanen sehingga ketika masa perjanjian berakhir, tidak ada jaminan bahwa petani dapat menikmati panen kayu hasil tanaman mereka.

Dengan demikian, kemitraan hutan akan sulit berhasil jika KPH tidak mengambil inisiatif untuk menambah masa kerjasama

dengan memperhatikan daur tebang tanaman kayu. Oleh karena itu aspek regulasi dan kebijakan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kemitraan hutan. Selain itu, perlu mengembangkan kapasitas petani agar dapat mengimplementasikan bisnis yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan Bae (2016) yang menyatakan bahwa kemitraan kehutanan akan sulit berhasil jika kepemimpinan KPH tidak mengambil inisiatif dalam mempromosikan masyarakat lokal untuk menggunakan wilayah KPH dalam regulasi dan kebijakan. Kemitraan kehutanan tidak saja mampu meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan hasil hutan dan kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan, namun juga diakui secara legal (Ilham, Purnomo, & Nugroho, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan agroforestri di areal kemitraan KPH Gedong Wani telah mendapat dukungan dari petani anggota kemitraan dalam bentuk dan tingkat partisipasi petani. Bentuk dan tingkat partisipasi petani masih perlu ditingkatkan ke level di mana aspirasi dan harapan petani benar-benar mendapat peluang untuk diadopsi dalam menentukan arah dan kebijakan kemitraan. Dalam pengembangan kelembagaan agroforestri, faktor kunci yang harus diperhatikan untuk keberhasilannya adalah adanya dukungan kebijakan, ketersediaan paket teknologi agroforestri, serta optimalisasi keterlibatan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan instansi penelitian/ perguruan tinggi (Ruhimat, 2016). Pembangunan kemitraan antara KPH Gedong Wani dengan KTH Agro Forest Park telah memenuhi ketiga faktor kunci tersebut yaitu, dukungan kebijakan (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan), ketersediaan teknologi agroforestri, adanya keterlibatan pengelola, instansi penelitian, dan masyarakat.

Kemitraan antara KPH Gedong Wani dan KTH Agro Forest Park masih mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39 Tahun 2003 di mana posisi petani dalam kemitraan diatur dalam perjanjian kerjasama antara KPH dan kelompok tani dengan waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang. Saat ini kemitraan tersebut dapat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Melalui kebijakan tersebut petani mendapat legalitas pengelolaan kemitraan yang dilakukan melalui skema kemitraan kehutanan dengan memiliki Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) atau dengan masa 35 tahun dan dapat diperpanjang.

Kepastian hukum dan dukungan keterlibatan yang telah berjalan diharapkan dapat berlangsung terus-menerus sehingga mampu meningkatkan kemandirian petani. Pada akhirnya petani mampu berpartisipasi secara optimal dalam upaya meningkatkan keberhasilan pengembangan agroforestri dan tujuan kemitraan. Fitria & Banowati (2018) menyebutkan hubungan partisipasi dan keberhasilan pengembangan agroforestri bersifat positif, artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin tinggi pula keberhasilan program agroforestri.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan karakteristik biofisik, Agroforestri Komplek sangat berpotensi dilakukan terhadap areal kemitraan KTH Agro Forest Park. Hal ini karena areal yang didominasi topografi datar memiliki potensi volume kayu sebesar 0,63m³/pohon yang didominasi jenis gmelina (*Gmelina arborea*) dan beberapa jenis tanaman palawija seperti padi hitam, jagung, ubi kayu, dan terong serta potensi wilayah cekungan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya atau tambak ikan air tawar.

Karakteristik sosial anggota KTH Agro Forest Park didominasi oleh jenis kelamin pria dengan umur produktif (41-50 tahun) yang bermata pencaharian utama sebagai petani, tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), luas garapan 0,26-0,50 ha, pengalaman berusahatani 16-20 tahun. Homogenitas kondisi sosial dan mata pencaharian akan memudahkan pewujudan dan peningkatan partisipasi.

Bentuk partisipasi petani dalam pengembangan agroforestri terlihat pada tahap perencanaan berupa pemikiran, tahap pelaksanaan dan pemanfaatan berupa sumbangan tenaga dan dukungan moril yaitu dukungan antar masyarakat dalam mengelola lahan kemitraan secara bersama dan bertanggungjawab. Belum terlihat adanya partisipasi dalam bentuk sumbangan finansial ataupun material serta partisipasi keterampilan dalam mengembangkan lahan garapan.

Tingkat partisipasi petani KTH Agro Forest Park dalam mengembangkan agroforestri berada pada tingkat kekuatan pada masyarakat (*citizen power*) level 6 yaitu kemitraan. Pada level ini petani telah memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat dalam kegiatan bersama pengelola kawasan, namun belum memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan maupun kegiatan manajerial.

A. Saran

Kemitraan pengelolaan hutan yang sudah terbentuk antara KPH Gedong Wani dan KTH Agro Forest Park perlu ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan level partisipasi tertinggi. Peningkatan partisipasi dapat dilakukan dengan meningkatkan legalitas kemitraan dalam skema Kemitraan Kehutanan yang telah memiliki KULIN KK. Pada posisi tersebut petani memiliki kekuatan hukum dalam pengambilan keputusan. Sejalan dengan hal tersebut maka peningkatkan level partisipasi melalui kegiatan pendampingan masyarakat secara

terpadu (KPH, dinas terkait, pemerintah desa, perguruan tinggi/lembaga penelitian, dan NGO setempat) agar berbagai permasalahan yang mungkin muncul seiring dengan dinamika perkembangan kelompok dapat diantisipasi sebelumnya. Model kemitraan tersebut perlu dikembangkan di daerah lain dalam skala yang lebih luas sebagai salah satu upaya resolusi konflik tenurial yang banyak terjadi dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penghargaan yang tinggi kami sampaikan pada Kepala Pusat Litbang Hutan (Dr. Kirsfianti L. Ginoga) atas dukungan sumber dana sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Ir. Guntur Hariyanto dan Ronald Horas Parluhutan Panjaitan, S. Hut., selaku Kepala dan Kasie pada UPTD KPH Gedong Wani atas ijin yang diberikan sehingga penelitian ini dapat berlangsung. Kepada para penyuluh (Qori dan Lela), terima kasih atas pendampingan yang diberikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Ketua dan anggota KTH Agro Forest Park atas kerjasamanya dalam mengembangkan agroforestri di wilayah UPTD KPH Gedong Wani.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviya, I., Salminah, M., Arifanti, V. B., Maryani, R., & Syahadat, E. (2012). Persepsi para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan lanskap hutan di Daerah Aliran Sungai Tulang Bawang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 9(4), 171-184.
- Arnstein, S. (1969). A ladder of citizen participation. *JAIP*, 35(4), 216-224.
- Bae, J. (2016). Perception of local community on forest partnership in indonesia: expectation and challenges - a case of forest partnership between forest management unit and local community in Lombok. *Journal of Korean Society of Forest Science*, 105(3), 366-376.
- Besamusca, J., Tijdens, K., Keune, M., & Steinmetz, S. (2013). Working women worldwide. Age effects in female labor force participation in 117 countries. *World Development, Elsevier*, 74(C), 123-141.
- Chankrajang, T. & Muttarak, R. (2017). Green returns to education: does schooling contribute to pro-environmental behaviours? Evidence from Thailand. *Ecological Economics*, 131, 434-448.
- Damiati, V., Lumangkun, A., & Dirhamsyah, M. (2015). Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kawasan Hutan Lindung Gunung Buduk sebagai sumber air bersih di Desa Idas, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau. *Jurnal Hutan Lestari*, 3(1), 142-149.
- Desmiwati. (2016). Studi tentang persepsi dan tingkat partisipasi petani penggarap di Hutan Penelitian Parung Panjang. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 4(2), 109-124.
- Diniyati, D. (2018). Kondisi sosial dan kelembagaan petani hutan rakyat di Kabupaten Tasikmakaya. *Jurnal Agroforestri Indonesia*, 1(1), 23-32.
- Fadli, M. (2010). *Kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia* (Tesis). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Fielke, S. J. & Bardsley, D. K. (2014). The importance of farmer education in South Australia. *Land Use Policy*, 39, 301-312.
- Fitria, A. & Banowati, E. (2018). Partisipasi masyarakat terhadap pelestarian hutan lereng Merapi melalui program agroforestri kopi di Desa Tlogolele, Kecamatan Selo. *Edu Geography*, 6(3), 163-169.
- Gumilar, I. (2012). Partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Akuatika*, III(2), 198-211.
- Hairiah, K. & Sumeru, A. (2013). Pertanian masa depan: agroforestri, manfaat dan layanan lingkungan (pp 23-35). *Prosiding Seminar Nasional Agroforestri "Agroforestri untuk Pangan dan Lingkungan yang Lebih Baik"* Malang, 21 Maret 2013.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Hurairah, A. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Humaniora.
- Ilham, Q. P., Purnomo, H., & Nugroho, T. (2016). Analisis pemangku kepentingan dan jaringan sosial menuju pengelolaan multipihak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. *Jurnal*

- Ilmu Pertanian Indonesia*, 21(2), 114-119.
- Irawan, E. (2011). Prospek partisipasi petani dalam pembangunan hutan rakyat untuk mitigasi perubahan iklim di Wonosobo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 85-92.
- Irene, S. (2011). *Desentralisasi partisipasi masyarakat dalam pendidikan: suatu kajian teoritis dan empirik*. R. Widada (Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jasuli, A. (2014). *Analisis pola kemitraan petani kapas dengan PT Nusafarm terhadap pendapatan usahatani kapas di Kabupaten Situbondo* (Skripsi). Universitas Jember, Jember.
- Laksana, N. S. (2013). Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(1), 56-66.
- Liani, M., Roslinda, E., & Muin, S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(3), 273-281.
- Murniati, Yeni, I., Minarningsih, & Sumarhani. (2018). Introducing sustainable agroforestry to encourage implementation of social forestry in Gedong Wani Forest Management Unit, Lampung, Indonesia (pp. 789-800). *Proceeding of International Workshop and Seminar: Innovation of Environmental-Friendly Agricultural Technology Supporting Sustainable Food Self-Sufficiency*, Surakarta, Central Java 18-20 September 2018.
- Nair, R. & Garrity, D. (2012). Agroforestry research and development: The way forward. In Nair, P.K.R. & Garrity, D. (Eds.), *Agroforestry - The Future of Global Land Use. Adv. Agroforestry*, 9, 515-531.
- Obiri, B. D., Agyeman, V. K., Kyereh, B., Nutakor, E., Obeng, E. ., & Britwum, S. (2011). Perception and participation of local communities in tree planting initiatives. *Ghana J. Forestry*, 27(3), 80-93.
- Parhusip, Suharti, S., Sukandi, T., Amano, M., & Matsumura, N. (2019). Economic analysis of local peoples involvement in community-based forest management (CBFM) in Desa Ciomas. *Journal of Forest Planning*, 25, 1-14.
- Peraturan Menteri Kehutanan No P.39/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Riyanto, A., Sumardjo, Gani, D., Ginting, B., & Sugihen. (2011). Model peningkatan partisipasi petani sekitar hutan dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(3), 176-195.
- Ruhimat, I. S. (2015). Tingkat motivasi petani dalam penerapan sistem agroforestry. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 12(2), 1-11.
- Ruhimat, I. S. (2016). Faktor kunci dalam pengembangan kelembagaan *agroforestry* pada lahan masyarakat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 13(2), 73-84.
- Ruhimat, I. S. (2017). Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengembangan usaha agroforestri: studi kasus di Desa Cukangkawung, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 14(1), 1-17.
- Salahuddin. (2012). Pengaruh komunikasi interaksional terhadap partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Kendari. *Jurnal Stimuli Ilmu Komunikasi*, 3, 70-78.
- Salampeppy, Nugroho, B. M., & Purnomo, H. (2012). Hubungan karakteristik responden dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Hutan Lindung Gunung Nona di Kota Ambon, Propinsi Maluku. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 9(3), 149-159.
- Sumiati. (2011). *Analisis kelayakan finansial dan faktor-faktor yang memotivasi petani dalam kegiatan agroforestry: kasus pada proyek pengembangan hutan kemasyarakatan SFDPPHK di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat* (Tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Wacana, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17, 7-15.
- Tanjung, N., Sadono, D., & Wibowo, C. T. (2017). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 14-30.

- Umagap, S. S., Ratag, S. P., & Walangitan, H. D. (2016). Partisipasi perempuan pada penerapan agroforestri di Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng. *Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi*, 7(5), 1-8.
- UPTD KPH Gedong Wani. (2015). Profil singkat UPTD KPH Gedong Wani.
- UPTD KPH Gedong Wani. (2016). Informasi KPHP Gedong Wani.
- Wicaksono, A. (2010). *Analisis tingkat partisipasi warga dalam tanggungjawab sosial perusahaan (studi kasus: PT. Izuzu Astra Motor Indonesia Assy Plant Pondok Ungu)* (Skripsi). Institut Pertanian Bogor.
- Winata, A. & Yuliana, E. (2012). Tingkat partisipasi petani hutan dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) Perhutani. *Jurnal Mimbar*, XXVIII(1), 65-76.
- Wulandari, P. R., Bendesa, I K.G., & Saskara, I. A. N. (2014). Analisis partisipasi masyarakat dan kepemimpinan terhadap tingkat keberhasilan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gerokgak, Buleleng Bali. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(2), 175-183